

TESIS

**KEBIJAKAN LEGISLATIF DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**



OLEH :

**ROBERT PANJAITAN
NIM 201020252007**


**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2013**

**KEBIJAKAN LEGISLATIF DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

OLEH :
ROBERT PANJAITAN
NIM 201020252007

**USULAN PENELITIAN TESIS INI TELAH
DISETUJUI PADA TANGGAL 30 AGUSTUS 2013**

Pembimbing I



Prof. Koesparmono Irsan, SIK., SH., MBA., MM

Pembimbing II



Prof. I Made Widnyana, SH., MH

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya



Prof. I Made Widnyana, SH., MH

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya




Dr. Anton Wachidin Widjaja

Tesis ini telah Diuji Pada
Tanggal : 30 Agustus 2013

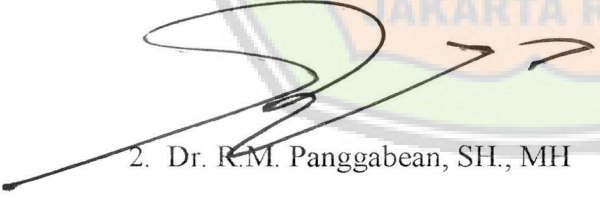
Panitia Penguji Tesis
Berdasarkan SK Direktur Program Pascasarjana
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Nomor : SKEP/004/VIII/2013/PPs-MIH/UBJ



Ketua : Prof. I Made Widnyana, SH., MH



Anggota : 1. Prof. Koesparmono Irsan, SIK., SH., MBA., MM



2. Dr. R.M. Panggabean, SH., MH

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
SK DIRJEN DIKTI NO. 143/D/T/2009 DAN NO. 12967/D/T/K-III2012

PERSETUJUAN TESIS

NAMA : ROBERT PANJAITAN
NIM : 201020252007
PROGRAM STUDI : MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA
JUDUL TESIS : KEBIJAKAN LEGISLATIF DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

DISETUJUI OLEH :

PEMBIMBING I



PROF. KOESPARMONO IRSAN, SIK., SH., MBA., MM

PEMBIMBING II



PROF. I MADE WIDNYANA, SH., MH

MENGETAHUI

KETUA PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

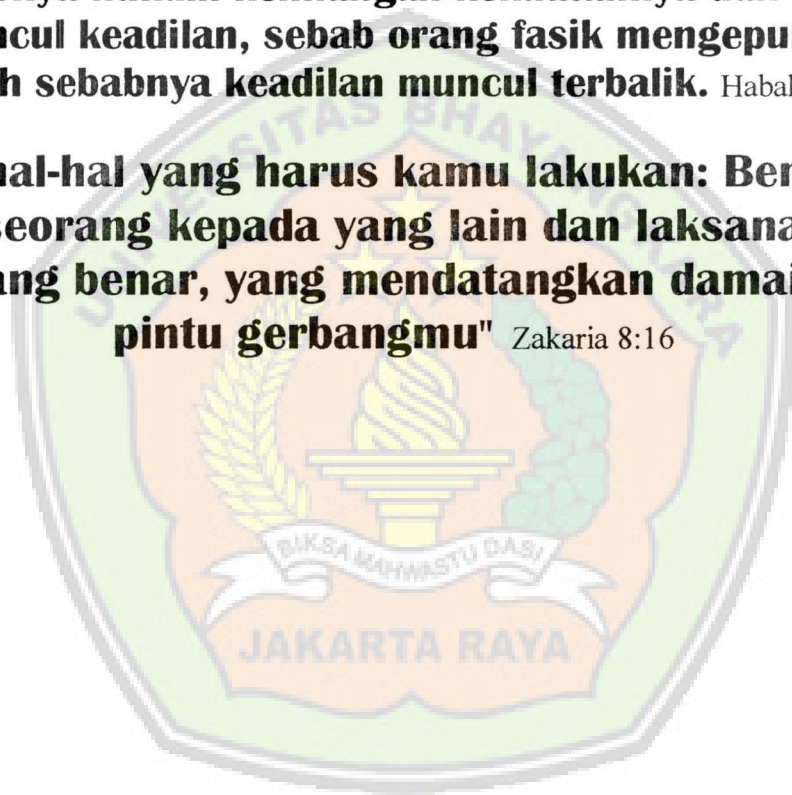


PROF. I MADE WIDNYANA, SH., MH

Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat; pemuka menuntut, hakim dapat disuap; pembesar memberi putusan sekehendaknya, dan hukum, mereka putar balikkan! Mika 7: 3

Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan, sebab orang fasik mengepung orang benar; itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Habakuk 1:4

"Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan: Berkatalah benar seorang kepada yang lain dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu" Zakaria 8:16



KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis panjatkan atas penyertaan serta perlindungan Tuhan Yesus yang memampukan Penulis untuk menunaikan penelitian dan penulisan Tesis ini dengan judul: **KEBIJAKAN LEGISLATIF DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.**

Dalam penulisan tesis ini, penulis sudah banyak menerima bimbingan dan arahan serta dorongan untuk maju dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini Penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada :

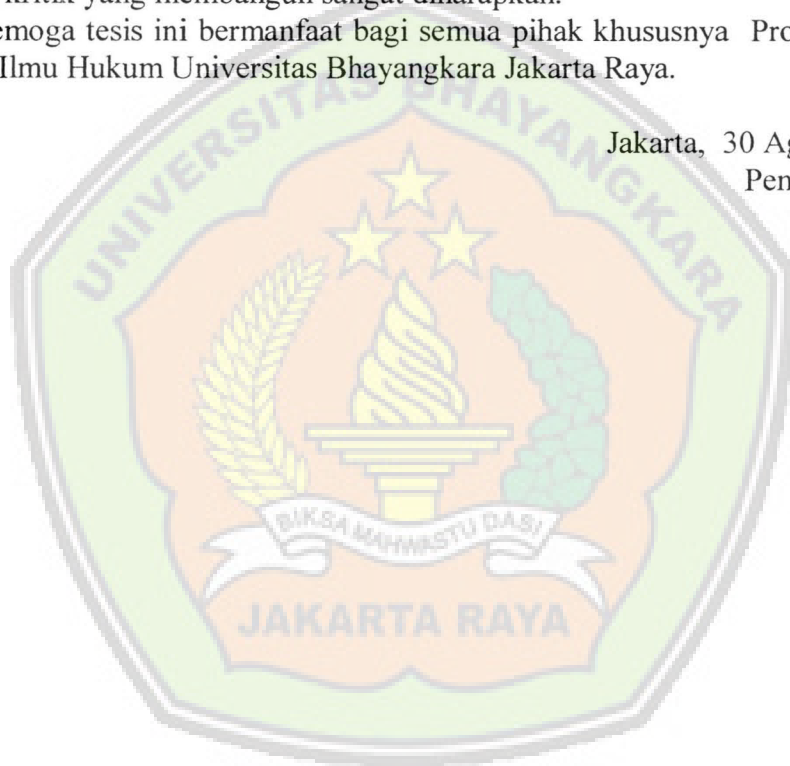
1. Bapak Irjen Pol. (Purn) Drs. H. Moh. Djatmiko, SH, M.S, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2. Bapak, Dr. Anton Wachidin Widjaja, MM, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan studi pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
3. Bapak Prof. I Made Widnyana, SH., MH., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta kesempatan untuk menyelesaikan studi pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
4. Bapak Prof. Koesparmono Irsan, SIK, SH, MBA, MM, dan yang amat terpelajar selaku mantan Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan sekaligus Pembimbing yang telah membuka cakrawala dan wawasan serta membimbing Penulis.
5. Bapak dan Ibu Guru Besar dan Staf Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah membagi ilmu dan pengalaman yang sangat berharga bagi saya baik dalam karir dan hidup bermasyarakat.
6. Ibu Ratna Silalahi, Bapak Riski, Bapak Sunyoto, Ibu Sumiati selaku Staf dan Karyawan Sekretariat Program Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberi bantuan dan fasilitas selama Penulis mengikuti Perkuliahan dan memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum.
7. Niren K Sinambela, isteriku tercinta, yang dengan kesabaran dan kasih yang tulus mendoakan dan setia mendampingi saya untuk penyelesaian studi Magister Ilmu Hukum ini.
8. Cok Deniro, Kurnia Dominic, Mikhael Cronika, anak-anak yang kebanggaan, serta keponakan Sherly Simanjuntak, yang telah rela mengorbankan kebahagiaan mereka agar saya lebih focus dalam menyelesaikan Program Magister Ilmu Hukum ini.

9. Bapak Lambok Antonius Siahaan dan Ibu Suzanna G Hambur serta Ibu Herini Mulyana, selaku pimpinan saya di Bank Indonesia, yang telah memberikan kesempatan, dukungan dan motivasi untuk saya menyelesaikan studi Magister Ilmu Hukum ini
10. Ibu Suparti, Ibu Wiwiek, Ibu Rini, selaku Pegawai Perpustakaan Bank Indonesia yang telah banyak membantu menyediakan fasilitas literatur, Journal dan akses *cyberlibrary* Bank Indonesia.
11. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan semangat untuk maju bersama menyelesaikan Studi ini.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari sempurna sehingga saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan.

Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak khususnya Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, 30 Agustus 2013
Penulis



ABSTRAK

Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) merupakan kejahatan yang baru dalam dunia hukum. Indonesia sudah mengakui tindak pidana pencucian uang sejak diberlakukannya UU No. 15 Tahun 2002 dan telah dilakukan perubahan terakhir dengan UU No. 8 Tahun 2010.

Meskipun sudah melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana pencucian uang, namun kejahatan pencucian uang masih marak di Indonesia. Hal ini tentu saja bertentangan dengan niat luhur perjuangan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mensejahterakan Rakyat Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dalam Tesis ini ditetapkan dua masalah pokok yaitu : Bagaimanakah rumusan dan pertanggungjawaban dalam tindak pidana pencucian uang?, dan Apakah penerapan hukuman (dakwaan) kumulatif dapat diterapkan terhadap tindak pidana korupsi dan pencucian uang?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, melalui pendekatan perundang-undangan. Penelitian dilakukan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa undang-undang, kepustakaan yang relevan dan membandingkan dengan hasil putusan pengadilan sebagai perbandingan implementasi undang-undang dalam masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah menerapkan kebijakan Anti Money Laundering melalui UU No. 8 Tahun 2010, namun implementasi dalam masyarakat masih belum memuaskan. Kebijakan legislatif dan pelaksanaan yang lebih berorientasi penegakan hukum yang berkeadilan dan efektif dan efisien masih diperlukan. Untuk mewujudkan pelaksanaan hukum yang efisien dan efektif sangat dimungkinkan penerapan dakwaan kumulatif dalam kasus tindak pidana pencucian uang dan korupsi.

KATA KUNCI : Kebijakan Kriminal, Pencucian Uang, Tindak Pidana

ABSTRACT

Money Laundering is a new crime in the law. Indonesia has criminalized money laundering in Act Number 8 Year 2010 amendment to Act Number 15 Year 2002.

Although government implemented anti - money laundering act but money laundering offenses is increasing. Such condition do not rely on the sublime value of Indonesia struggle 's to realize social welfare of the peoples.

According to the above problems, this thesis try to answer two of research topics, first, how to formulate criminal and responsibility of money laundering crime. Second, Is there possibility to actualize integrated sentence of corruption and money laundering crimes?

The study use legal-normative approach. For supporting, legal-normative is done the statute approach too. This study is based on primary data such as law material and secondary data such as Act obtained through library research such and compare with court sentences.

The result of study showed that money laundering still increased event Indonesia has implemented Anti Money Laundering criminal in Act Number 8 Year 2010. Legislative policy need to reformulate law to find justice and effective and efficient of law enforcement. Criminal policy must adopt the corruption and money laundering nexus and implement cumulative accusation of their crimes.

KEY WORD : Criminal Policy, Money Laundering, Crimes

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
ABSTRAK.....	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Kerangka Teori dan Konseptual	12
E. Metode Penelitian	26
F. Sistematika Penulisan	30
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Tindak Pidana	32
B. Tujuan Pidana	35
C. Asas-asas Legalitas Dalam Hukum Pidana	56
D. Kebijakan Kriminal dan Kebijakan Hukum Pidana.....	57
E. Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.....	64
F. Tindak Pidana Pencucian Uang	71
BAB III	RUMUSAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
A. Undang-Undang Alat Mencapai Tujuan.....	95
B. Perumusan Tindak Pidana Dalam UU No. 8 Tahun 2010.....	96
C. Pertanggung jawaban Pidana	113
D. Perumusan Sanksi Pidana.....	117

BAB IV	PENARAPAN HUKUMAN (DAKWAAN) KUMULATIF TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG	
	A. Perbarengan Tindak Pidana.....	126
	B. Korupsi di Indonesia	129
	C. Masalah Pemberantasan Pencucian Uang di Indonesia	138
	D. Integrasi Pemberantasan <i>Money Laundering</i> dan Korupsi.....	147
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	150
	B. Saran	152
	DAFTAR PUSTAKA	154

